

# ISU Sepekan

**BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Minggu ke 2 Agustus 2021 (6 Agustus s.d. 12 Agustus)

## MEREFORMASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) BERBASIS RISIKO



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

Sidiq Budi Sejati  
Peneliti Pertama/Politik Dalam Negeri  
sidiq.sejati@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Berdasarkan Laporan Bank Dunia Tahun 2020 kemudahan berusaha atau *ease of doing business* di Indonesia mendapat peringkat ke-73 dari 190 negara. Namun Presiden Joko Widodo menilai capaian tersebut belumlah cukup. Presiden mengatakan masih mendapat banyak aspirasi dari para pelaku usaha kecil, menengah, dan besar terkait pelayanan perizinan usaha yang masih sulit, lama dan berbelit-belit. Presiden mengingatkan bahwa instrumen yang menentukan daya tarik investasi adalah kemudahan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi, cepat, dan sederhana.

Melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) terbaru ini jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya, dimana usaha dengan risiko tinggi perizinan berusaha berupa izin, risiko menengah berupa sertifikat standar, dan risiko rendah cukup melalui pendaftaran dan nomor induk berusaha. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menjamin tingkat keberhasilan sistem OSS Berbasis Risiko ini mencapai 83% dan sisanya 17% masih dalam upaya perbaikan serta pengembangan. Sistem OSS ini dibangun dengan 2 (dua) versi yaitu online dan semi online. Versi semi online digunakan untuk daerah di Indonesia yang masih minim pasokan listrik dan jaringan internet yang belum stabil, sedangkan daerah yang tidak ada listrik dan jaringan internet sama sekali Kementerian Investasi bersama Indosat sebagai vendor yang ditunjuk masih mencari solusi terbaik bagaimana agar pelayanan perizinan di daerah-daerah tersebut tetap terlaksana secara maksimal.

Sistem OSS Berbasis Risiko ini diklaim menawarkan kemudahan dan kecepatan respon pengajuan izin usaha untuk investor serta tidak bermaksud untuk menggejiri kewenangan pemerintah daerah namun memberikan standar untuk level pusat sampai daerah agar tanggung jawab semakin jelas dan pelayanannya semakin sinergis. Sistem OSS ini telah merangkul lebih dari 70 Undang-undang dan 47 Peraturan Pemerintah sehingga aturan-aturan yang selama ini menghambat dan menyulitkan penerbitan perizinan telah direformasi dan merupakan sebagai wujud dari Amanah Undang-Undang Cipta Kerja.

### SUMBER

Kompas. com, 9 Agustus 2021; Youtube OSS Indonesia dan BKPM TV, 9 Agustus 2021.